

Judul : Pemerintah Akui Ada Penolakan Pemekaran Papua
Tanggal : Rabu, 27 April 2022
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 4

Pemerintah Akui Ada Penolakan Pemekaran Papua

DPR masih menunggu surat presiden (surpres) dan putusan MK untuk membahas RUU DOB di wilayah Papua.

EMIR CHAIRULLAH
emir@mediaindonesia.com

PEMERINTAH mengakui adanya pihak yang tidak setuju dengan proses pembentukan daerah otonomi baru (DOB) di wilayah Papua. Namun demikian, ungkap Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, pemerintah juga tetap memperhatikan suara lain yang setuju dengan proses DOB di Papua. "Jangan mendengar satu suara, tapi mengabaikan suara yang lain," katanya di Istana Wapres, kemarin.

Menurut Tito, sikap pro dan kontra dalam menyikapi proses pemekaran di satu daerah merupakan hal yang wajar. Hal terpenting, tambahnya, tidak terjadi kekerasan akibat proses pemekaran wilayah ini. "Ini kan negara demokrasi. Ada yang setuju dan tidak setuju itu biasa," jelasnya.

Ia mencontohkan, proses pemekaran Provinsi Papua yang kemudian dimekarkan menjadi Papua dan Papua Barat yang awalnya terjadi pro dan kontra. "Tapi kan kita lihat hasilnya sekarang," ungkapnya.

Mengenai keberatan Majelis Rakyat Papua (MRP) terhadap proses pemekaran provinsi ini, Tito mengungkapkan saat pertemuan dengan Presiden Joko Widodo,

suara MRP tidak sepenuhnya bulat. "MRP itu ada, yaitu MRP Barat dan MRP. MRPB setuju dengan pemekaran, MRP minta di-*pending* untuk mendengarkan aspirasi. Selain itu, pemerintah daerah setempat yang mendukung tidak kalah banyaknya," jelasnya.

MRP pun masih melobi sejumlah pihak terkait dengan penundaan pembahasan 3 Rancangan DOB, kali ini mereka mendatangi Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Ketua MRP Timotius Murib meminta DPR menunda pembahasan 3 RUU DOB hingga ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan uji materi atau *judicial review* Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

"Pemekaran ditangguhkan sampai ada keputusan MK. Karena sekarang sedang berproses uji materi UU Otsus di MK sehingga harus di-*pending* rencana pemekaran 3 wilayah," ungkap Timotius.

Turut mendampingi Timotius dari pihak MRP yakni, Wakil Ketua MRP Yoel Luiz Mulait, Ketua Panitia Musyawarah MRP Benny Sweny, tenaga ahli Joram Wambrau, staf khusus MRP Andi Andreas Goo, staf khusus Onias Wenda, serta Direktur Eksekutif Amnesty Internatio-

nal Indonesia Usman Hamid.

Dalam kesempatan tersebut, Timotius juga menyampaikan kekecewaannya terhadap DPR yang dinilai abai melibatkan MRP dalam rencana pemekaran 3 provinsi baru di Papua. Menurut Timotius, berdasarkan aspirasi yang muncul di bawah meminta agar DPR tidak melanjutkan pembahasan 3 RUU tersebut sampai ada putusan MK soal hasil uji materi UU Otsus.

"Alasan pertama, masih diberlakukan moratorium. Kedua, tanpa ada kajian ilmiah. Ketiga, tanpa aspirasi dari bawah," ungkap Timotius.

Surpres

Dasco menjelaskan pembahasan RUU DOB akan menunggu proses uji materi di MK dan pihaknya juga masih menunggu surat presiden (surpres) pemerintah. "Tadi kami sampaikan bahwa kami akan mengomunikasikan kepada komisi terkait sambil menunggu surat presiden (surpres) dan putusan MK yang mungkin sebentar lagi setelah 6 kali masa sidang berlangsung," ungkap Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Dasco melanjutkan, DPR akan semaksimal mungkin menampung aspirasi yang disampaikan MRP. "Kami akan coba mengomunikasikan dengan pihak-pihak terkait agar kegiatan-kegiatan menyangkut itu (pembahasan) dapat berjalan dengan lancar," ungkap Dasco. (Uta/P-5)